



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM**

**Oleh : I.M. Fatimah Zahro, S.Pd.I., M.Pd.I**

***Abstrak:** Dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidikan Islam di mana objeknya adalah pribadi anak yang sedang berkembang, maka adanya hubungan timbal balik antara penanggung jawab pendidikan yaitu pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat pada umumnya mutlak diperlukan. Dengan kata lain, suatu kerja sama antara penanggung jawab pendidikan tersebut perlu diintensifkan, adanya keharusan hubungan antara sekolah dengan orang tua murid (masyarakat) tersebut, karena Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan serta Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Jika dilihat dari sisi maknanya, hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat luas terhadap sekolah adalah meletakkan orang-orang yang tepat pada posisi ketua komite sekolah dan kepala sekolah. Dua posisi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membangun dan mengelola lembaga pendidikan menjadi sekolah yang unggul dan kompetitif.*

Diterima Redaksi: 21-06-2021 Selesai Revisi: 23-06-2021 Diterbitkan Online: 27-06-2021

**Kata kunci :** *Partisipasi masyarakat, pengembangan, pendidikan Islam*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk membentuk generasi muda yang siap mengganti tongkat estafet generasi tua dalam rangka meraih masa depan yang cerah. Selain itu pendidikan berperan mensosialisasikan kemampuan baru kepada mereka agar mampu mengantisipasi tuntutan masyarakat yang dinamis.

Dalam masyarakat yang dinamis pendidikan memegang peranannya yang sangat menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin* merupakan konsekuensi logis bagi ummatnya untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, baik moral maupun intelektual serta keterampilannya dan bertanggung jawab.

Sementara pandangan klasik tentang pendidikan pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus, yaitu:

1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat di masa mendatang.
2. Mentransfer pengetahuan sesuai dengan peranan yang diharapkan
3. Mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban.<sup>1</sup>

Antara butir kedua dan ketiga gambaran di atas memberikan pengertian bahwa<sup>1</sup> pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan belaka, tetapi juga sekaligus sebagai transfer pengetahuan dan budaya.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Athiyah Al-Abrasyi:

Pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia, meresapkan Fadlillah di dalam jiwa para siswa, membiasakan mereka berpegang pada moral yang tinggi dan menghindari hal-hal yang tercela, berfikir secara rohaniyah dan Insaniyah (Perikemanusiaan) serta menggunakan waktu buat belajar ilmu duniawi dan ilmu-ilmu keagamaan.<sup>2</sup>

Dari pernyataan di atas dapat memberikan gambaran bahwa pendidikan Islam membentuk keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama sebagai dasar. Disamping itu, berangkat dari kenyataan yang ada bahwa berdirinya suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari konteks sosial dan kultural masyarakat setempat maka pendidikan mempunyai otoritas untuk menentukan lembaganya sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sebagai perwujudan dari usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan formal, maka tentu keberadaan pendidikan tersebut di bawah tanggung jawab masyarakat. Karena urusan pendidikan adalah urusan bersama,

---

<sup>1</sup> A. Syafi'i Ma'arif dkk, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 27

---

<sup>2</sup> Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 12

bukan eksklusif menjadi urusan pemimpin dan pakar-pakar pendidikan saja. Oleh karena itu kebijakan pendidikan baru bisa berjalan lancar atau mantap hanya berkat dukungan masyarakat, yaitu berupa partisipasi aktif segenap warga masyarakat.<sup>3</sup>

Diakui atau tidak, lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan dan peningkatannya. Dengan demikian partisipasi dan peran serta masyarakat adalah menggerakkan pembangunan di bidang pendidikan dan sekaligus mewujudkan lembaga pendidikan sebagai wadah yang potensial sehingga bisa sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat sebagai pelaksana atau subyek kehidupan tentunya masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan, di mana antara masyarakat dan lembaga pendidikan merupakan dua unsur yang tak dapat dipisahkan, karena masyarakat berfungsi sebagai pelaksana sekaligus sebagai sumber dan pemakai hasil pendidikan, begitu juga sebaliknya lembaga pendidikan sebagai wadah atau sarana yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas di mana keberadaannya tidak lepas dari pelaksanaannya yaitu masyarakat.

Adapun salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam ialah membantu menyiapkan fasilitas yang bersifat fisik seperti tempat dan perlengkapan belajar di kelas, alat-alat pengajaran, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan berbagai

praktikan, perlengkapan keterampilan, dan lain-lain.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah-masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Antara lain:

1. Apa saja Pengertian Partisipasi Masyarakat
2. Apa saja Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat
3. Apa saja Alasan-Alasan Perlunya Partisipasi Masyarakat
4. Apa saja Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan di Sekolah
5. Apa saja Upaya-Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pendidikan.

### **Deskripsi Teoritis**

#### **A. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian partisipasi adalah: hal turut serta (pengikutsertaan dalam suatu kegiatan) baik langsung maupun tidak langsung”.<sup>4</sup>

Adapun masyarakat menurut Raib Linton ialah: “Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu”.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pengertian partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan atau organisasi sosial untuk

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 732

<sup>5</sup> Abu Ahmadi, *Pengantar Sosiologi*, (Semarang: CV. Ramadhani, 1975), hal.35

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Tujuan Pendidikan Harus Singkron Dengan Tujuan Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hal. 11

mewujudkan keinginan dan kepentingan bersama, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan.

a. Dasar-Dasar Partisipasi Masyarakat

1) Dasar Agama

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, tidak lepas dari dirinya sendiri sebagai makhluk individu, manusia tidak bisa hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Untuk itu diperlukan aturan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan tuntunan agar manusia saling membantu dalam segala aspek kehidupannya. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Al-Maidah ayat 02 yang artinya :

Artinya: *"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al-Maidah : 02).*<sup>6</sup>

Dari ayat di atas jelaslah bahwa kita umat Islam telah diperintahkan untuk saling tolong menolong di antara sesama dalam hal kebaikan termasuk di dalamnya ikut serta membangun dan memajukan pendidikan Islam. Karena maju mundurnya pendidikan Islam tergantung pada umat Islam itu sendiri, bagaimana mereka mengembangkan dan memajukan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam itu mengalami kemajuan ke arah masa depan yang cemerlang sesuai dengan cita-cita agama Islam.

2) Dasar Yuridis Formal

Dasar yuridis formal adalah segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 54 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu pelayanan pendidikan.

2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan (pendidikan Islam) mempunyai dasar yang kuat, baik dari segi agama maupun dari segi hukum dasar hukum negara.

b. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Tujuan partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi maksud dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Islam sehingga outputnya sesuai dengan keinginan masyarakat (sebagaimana yang telah diharapkan) bersama. Hal ini, sejalan dengan pernyataan Kartini Kartono yang menyatakan sebagai berikut:

Urusan pendidikan adalah urusan kita bersama yaitu: urusan seluruh bangsa Indonesia, jelas bukan eksklusif menjadi urusan pemimpin dan pakar-pakar pendidikan saja.

---

<sup>6</sup> Mujamma' al-Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: tp, 1420H), hal. 157

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang No. 02 Tentang Sistem Pendidikan Tahun 2003 pasal 54 ayat 1 dan 2*

Oleh karena itu kebijakan pendidikan ditingkat nasional baru bisa berjalan lancar atau mantap hanya berkat dukungan rakyat banyak yaitu berupa partisipasi aktif segenap warga masyarakat.<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat dalam mencapai tujuan dan peningkatannya. Di samping itu juga turut serta masyarakat untuk menegakkan pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama akan pendidikan sekaligus mewujudkan lembaga pendidikan yang potensial sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan masyarakat dan pemerintah.

### **B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat sebagai pelaksana atau subyek kehidupan tentunya masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan, di mana antara masyarakat dan lembaga pendidikan merupakan dua unsur yang tak dapat dipisahkan, karena masyarakat berfungsi sebagai pelaksana sekaligus sebagai sumber dan pemakai hasil pendidikan, begitu juga sebaliknya lembaga pendidikan sebagai wadah atau sarana yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas di mana keberadaannya tidak lepas dari pelaksanaannya yaitu masyarakat.

bentuk-bentuk partisipasi masyarakat secara umum dapat berbentuk:

- a. Fasilitas yang bersifat fisik seperti tempat dan perlengkapan belajar di kelas, alat-alat pengajaran, buku-

buku pelajaran, dan perlengkapan berbagai praktikan, perlengkapan keterampilan, dan lain-lain.

- b. Fasilitas yang bersifat non fisik seperti waktu, kesempatan biaya dan berbagai aturan serta kebijaksanaan pimpinan sekolah.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok/bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan sarana dan prasarana pendidikan.

Yang dimaksud dengan pembinaan di sini adalah pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan segala sesuatu yang ikut menunjang berhasilnya suatu pendidikan, seperti gedung sekolah, buku, alat peraga, alat keterampilan dan sebagainya.

Selanjutnya dalam membina sarana dan prasarana pendidikan, sebagai lembaga pendidikan formal yang berstatus swasta, keberadaannya di bawah tanggung jawab masyarakat yang merupakan sumber utama bagi perkembangannya. Khususnya adalah orang tua murid lewat Badan Pembinaan dan Penyelenggara Pendidikan (BP3) dan melalui badan penyantun.

Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) sebagai badan yang membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah, anggota-anggotanya diambil dari para orang tua siswa yang aktif/bersedia duduk dalam badan itu. Tugas BP3 ini yaitu membantu sekolah agar proses belajar para siswa menjadi lebih lancar, terutama yang berkaitan dan

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Tujuan Pendidikan Harus Sinkron dengan Tujuan Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hal. 11

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, IAIN, 1982), hal. 113-114

yang dapat dikaitkan dengan masyarakat.<sup>10</sup>

Sedangkan dewan penyantun adalah suatu badan yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa tokoh masyarakat yang menaruh minat terhadap pendidikan. Dalam batas-batas tertentu, dapat mencampuri urusan pendidikan, sehingga ia memiliki data/informasi yang jelas. Atas dasar informasi inilah dewan penyantun ini mampu berkomunikasi dengan para pengurus lembaga pendidikan, dalam usaha memecahkan problem-problem pendidikan yang dihadapi.<sup>11</sup>

Dengan demikian tugas utama dewan penyantun adalah menjadi penghubung antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Masalah-masalah pendidikan yang berkaitan atau yang dapat dikaitkan dengan masyarakat dibahas bersama antara para pengelola pendidikan. Kemudian ditangani oleh dewan penyantun untuk direalisasikan pada anggota masyarakat. Isi masalah itu bermacam-macam sesuai dengan jenis-jenis partisipasi yang diharapkan dari masyarakat.

b. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana/biaya pendidikan

Masalah yang paling utama yang harus diperhatikan dalam suatu pendidikan adalah masalah dana/biaya. Karena dana/biaya merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan khususnya bagi lembaga pendidikan Islam yang berstatus swasta, karena beban dan tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak penyelenggara (yayasan) dan masyarakat.

Yayasan pendidikan tidak mengkhuskan diri membantu para dewan penyantun dalam mengadakan

kontak/kerja sama dengan masyarakat, melainkan bersama para dewan penyantun menangani pendidikan secara keseluruhan. Hanya bedanya kalau para dewan penyantun lebih banyak bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari, maka yayasan lebih banyak menangani kebijakan dan strategi pendidikan.<sup>12</sup>

Hal ini mudah dipahami karena sesungguhnya yayasan itu ialah pendiri dan penanggung jawab utama lembaga pendidikan. Karena mengemban misi seperti itulah maka yayasan berusaha agar lembaga pendidikan itu tetap hidup dan semakin maju. Untuk itu, salah satu usaha yayasan ialah mengadakan kerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung pendidikan, terutama dana, agar lembaga yang dibina tetap tegak berdiri dan semakin maju.

Jadi, dengan adanya dana yang lebih atau minimal cukup untuk pembayaran pendidikan, maka pengembangan pendidikan Islam akan dengan mudah untuk dilaksanakan. Tetapi bila dana kurang bahkan sangat tidak mencukupi untuk pembiayaan pendidikan maka pengembangan pendidikan akan terhambat. Untuk itu jalan untuk mengatasi agar tidak kekurangan dana harus diupayakan sangat efisien dan efektif mungkin dalam pengelolaannya.

c. Partisipasi masyarakat dalam Meningkatkan kualitas mutu pendidikan

Sekolah atau lembaga pendidikan akan dapat dikatakan berhasil dan baik dalam pelaksanaan pendidikan, apabila telah menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat maupun pemerintah. Untuk memenuhi

---

<sup>10</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 201

<sup>11</sup> Ibid., hal. 200

---

<sup>12</sup> Ibid. hal. 201

tuntutan dari masyarakat maka pendidikan harus dapat mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat, karena dalam masyarakat banyak sumber pengetahuan yang mungkin guru sendiri belum mengetahuinya. Selain itu memang pada kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang-orang yang terdidik dan lembaga pendidikan membutuhkan masyarakat.

Bukti nyata yang sudah dilakukan yang dapat meningkatkan citra masyarakat terhadap lembaga pendidikan ialah kemampuan para siswa menjawab pertanyaan dalam acara cerdas-cermat, piagam-piagam yang diserahkan kepada beberapa siswa sebagai bukti kemampuan mereka dalam bidang-bidang tertentu, dan berbagai penemuan baru oleh para siswa/mahasiswa dalam bidang-bidang tertentu. Yang paling menarik bagi masyarakat adalah bila lembaga pendidikan itu sanggup mencetak lulusan yang siap pakai. Artinya bila lulusan itu baik maka sebagai tenaga menengah maupun sebagai tenaga ahli tidak membutuhkan latihan lagi sebelum bekerja, melainkan secara langsung dapat melaksanakan pekerjaan dalam bidangnya secara relatif baik. Keadaan seperti ini tidak hanya disambut dengan gembira oleh konsumen pemakai tenaga kerja, tetapi juga oleh para orang tua lulusan itu sendiri, sebab mereka pada umumnya mendambakan puteranya cepat bekerja. Untuk mewujudkan lulusan seperti ini memang merupakan tantangan berat bagi para pengelola pendidikan.<sup>13</sup>

### **C. Alasan-Alasan Perlunya Partisipasi Masyarakat**

Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa

pemerintahan di buat dari, oleh dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijaksanaan negaranya, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut, juga berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena itu partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan merupakan suatu keniscayaan.<sup>14</sup>

Selain alasan demokrasi, kebijaksanaan pendidikan tersebut secara konkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, justru memperkuat pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana formal.

Pembangunan yang dilakukan oleh negara termasuk salah satu wujud dari implementasi kebijaksanaan yang diformulasikan. Pembangunan tersebut, tidak hanya masalah fisik dan mental, melainkan juga sekaligus pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, dengan demikian termasuk bagian atau objek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat juga dipandang sebagai modal dasar pembangunan, jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan yang digalakkan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 79

<sup>15</sup> Ibid, hal. 80

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 197-198

Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, tidak sekedar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahnya, melainkan bahwa kebijaksanaan tersebut hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan masyarakat akan semakin banyak dalam pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan.

#### **D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan di Sekolah**

Masyarakat memandang sekolah (lembaga pendidikan) sebagai cara yang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa, karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Namun hal ini tidak otomatis terjadi terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak warga masyarakat yang belum paham akan makna lembaga pendidikan, lebih-lebih bila kondisi sosial ekonomi mereka rendah, mereka hampir menghiraukan akan lembaga pendidikan. Pusat perhatian mereka adalah pada kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Untuk mengikutsertakan masyarakat ini dalam pembangunan pendidikan di sekolah, sudah sepatutnya para pengelola pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Para pengurus dapat mengundang para tokoh ini untuk membahas bentuk-bentuk kerja sama dalam meningkatkan pendidikan khususnya pendidikan Islam.

Beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan ialah:

a) Mengawasi perkembangan

pribadi dan proses belajar puteranya di rumah dan bila perlu memberi laporan/berkonsultasi ke lembaga pendidikan.

- b) Menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing puteranya agar giat belajar.
- c) Menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan.
- d) Berusaha melunasi SPP dan dana bantuan pendidikan lainnya.
- e) Memberikan umpan balik kepada lembaga pendidikan tentang pendidikan, terutama yang menyangkut keadaan putera-puteranya.
- f) Bersedia datang ke lembaga pendidikan bila diundang.
- g) Ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti; keuangan, sarana, kegiatan dan sebagainya.
- h) Membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga dalam memajukan proses belajar mengajar.
- i) Meminjami perlengkapan pertukangan, kesenian, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh lembaga.
- j) Bersedia menjadi tenaga pelatih dan nara sumber bila ditunjuk
- k) Menerima para siswa/mahasiswa dengan senang hati bila mereka belajar di masyarakat.
- l) Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan.
- m) Ikut mengontrol jalannya pendidikan.
- n) Bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner pengelola pendidikan dalam

---

<sup>16</sup> Made Diparta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 196-197.



mempertahankan dan memajukan lembaga dan lain-lain.<sup>17</sup>

Jadi, walaupun garis-garis besar aktivitas pendidikan beserta metode kerjanya sudah diberikan oleh pemerintah pusat, bukan berarti tidak ada yang perlu dipikirkan oleh para pengurus yayasan beserta tokoh-tokoh masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Aspek-aspek kedaerahan, yaitu pemenuhan aspirasi daerah, penyesuaian dengan kondisi daerah adalah medan utama yang digarap oleh pemikiran dan pelaksanaan bersama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Sementara itu realisasi aktivitas yang ditentukan oleh pemerintah pusat pun tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat bila menginginkan hasil yang lebih sempurna.

#### **E. Upaya-Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pendidikan**

Setiap kebijakan yang digulirkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan, umumnya mendapat respons dari masyarakat. Meskipun mungkin suatu kebijakan tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat, tetapi haruslah disadari bahwa sebagian masyarakat yang lainnya pasti ada yang mendukung, pasti ada di antara lapisan masyarakat yang mau berpartisipasi dalam bentuk apapun partisipasinya. Meskipun mungkin pembuat dan pelaksana kebijakan tersebut tidak mengupayakan sama sekali partisipasi masyarakat.<sup>18</sup>

Sungguh pun demikian, pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah senantiasa berusaha agar kebijakan yang digulirkan melibatkan sebanyak mungkin

partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaannya, inilah perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri.
- b. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
- c. Menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijakan agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijakan yang diimplimentasikan.
- d. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implimentasi kebijakan dengan kepentingan mereka, masyarakat memang perlu diyakinkan, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijakan.
- e. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah, dan kebijakan yang sah tersebut adalah salah satu dari wujud pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Ibid, hal., 199-120

<sup>18</sup> Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, hal.81-82.

dan perwujudan aspirasi masyarakat.<sup>19</sup>

#### *Pengembangan Pendidikan Islam*

J.B.A.F. Maijor Polak dan Van Hove memberi gambaran bahwa yang dimaksud pengembangan adalah “bukan suatu proses, melainkan suatu usaha atau lebih tepat suatu *policy* (kebijaksanaan)”.<sup>20</sup>

Dari gambaran di atas yang dimaksud dengan pengembangan dalam hal ini adalah suatu langkah usaha, cara yang tepat untuk memajukan lembaga pendidikan Islam yang telah ada menuju kearah yang lebih maju atau lebih baik dan sempurna.

Adapun pengertian pendidikan Islam, telah dikemukakan oleh pakar-pakar pendidikan yaitu:

a. Menurut Ahmad D. Marimba yang dikutip oleh Hj. Nur Uhbiyati dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam menyatakan bahwa: Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.<sup>21</sup>

b. Menurut Musthafa Al-Ghulyani yang dikutip oleh Hj. Nur Uhbiyati menyatakan bahwa: Pendidikan Islam ialah menanamkan akhlaq yang mulia dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlaq itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.<sup>22</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa “Pendidikan Islam” ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim.

Jadi, yang dimaksud dengan pengembangan pendidikan Islam dalam hal ini pengembangan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam

#### *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam*

Suatu prinsip dari perkembangan hidup manusia adalah terwujudnya hubungan timbal balik antara satu potensi dengan potensi yang lainnya. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka akan mudah untuk mencapai segala cita-cita yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidikan Islam di mana objeknya adalah pribadi anak yang sedang berkembang, maka adanya hubungan timbal balik antara penanggung jawab pendidikan yaitu pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat pada umumnya mutlak diperlukan. Dengan kata lain, suatu kerja sama antara penanggung jawab pendidikan tersebut perlu diintensifkan, adanya keharusan hubungan antara sekolah dengan orang tua murid (masyarakat) tersebut, karena :

1. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
2. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat.
3. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
4. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 82-83

<sup>20</sup> J.B.A.F. Maijor Polak dan Van Hove, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkasan*, (Jakarta: Ikhtiyar Baru, 1985), hal., 197.

<sup>21</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 09

<sup>22</sup> Ibid., hal. 10

5. Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya.

Bentuk aktualisasi dan pernyataan pnyadaran diri masyarakat secara kolektif dapat berupa partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya dan kelompoknya dalam komunitas yang melingkupinya. Cara-cara kolektif berpartisipasi dalam bermasyarakat bisa teraktualisasikan dalam bentuk musyawarah dan juga terbentuknya institusi lokal oleh masyarakat itu sendiri.

Musyawarah adalah sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah juga merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan rasa partisipasi dan rasa memiliki atas keputusan dan rencana pembangunan. Musyawarah dapat merupakan cara analisis kebutuhan dan tidak sekedar keinginan yang bersifat superfisial demi pemenuhan kebutuhan sesaat. Oleh karena itu pemilihan orang-orang yang mewakili sebagai peserta musyawarah untuk suatu keperluan seperti merumuskan kebutuhan masyarakat haruslah benar-benar yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Langkah lain dalam proses partisipasi masyarakat itu adalah pembentukan kelompok. Melalui kelompok akan dibina solidaritas kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri { Karsidi : 2001 }. Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok adalah melalui pendekatan kepentingan yang sama secara primordial. Dalam kelompok primordial itu, para anggota kelompok akan memperoleh referensi yang sama, Dengan

bertolakbelakang dari kelompok primordial, maka para anggota akan merasakan adanya hal-hal baru jika mereka bersedia membandingkannya dengan situasi lama. Ini akan menimbulkan keasyikan dan motivasi sendiri. Melalui kelompok, para anggota akan menyusun program, bekerja secara sistematis serta bisa merasakan adanya perkemabangan dan kemajuan sebagai hasil kegiatan mereka.

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat telah terjadi di sekolah dalam praktik penyelenggaraan musyawarah maupun pembentukan institusi lokal. 2 jenis kebijakan pemerintah tentang MBS disekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah serta Majelis Wali Amanah di perguruan tinggi BHMN adalah contoh dari bentuk perwujudan mekanisme dan struktur kelembagaan untuk menyalurkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

Cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau tempat komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada. Kondisi ini menuntut kesiapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Sebaliknya dari pihak masyarakat juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebagai contoh adalah tanggungjawab dunia usaha/ industri. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu dari suatu lembaga pendidikan/ sekolah sampai dapat meluluskan alumninya, lalu menggunakannya jika menghasilkan output yang baik dan mengkritiknya jika terdapat output yang tidak baik.

Partisipasi dunia usaha/ industri terhadap lembaga pendidikan harus ikut bertanggungjawab untuk menghasilkan output yang baik sesuai dengan rumusan harapan bersama. Demikian juga kelompok masyarakat lain, termasuk orangtua siswa. Dengan cara demikian, maka mutu pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara lembaga pendidikan dan komponen-komponen lainnya dimasyarakat.

Bagaimana dengan tanggungjawab Negara terhadap pengembangan pendidikan ? Uraian diatas bukan bermaksud untuk mengurangi tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam bidang pendidikan. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintmtahan daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setaip warga Negara dari usia 7-15 tahun. Lebih dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua / warga dan kelompok masyarakat masih sangatlah luas.

Untuk itu , maka dalam kondisi kualitas layanan dan output pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryadi Prawirosentono { 2002 : 12 } bahwa ada 6 hal yang bisa mempengaruhi produk dan salah satunya adalah

SDM. SDM kita ibaratkan sebagai kelompok masyarakat, yang mana bisa membawa pengaruh pendidikan yang ada dalam sebuah Negara. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan hubungan sekolah dan masyarakat ialah:

a. Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk:

- a) Memelihara kelangsungan hidup sekolah
- b) Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
- c) Memperlancar proses belajar mengajar.
- d) Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

b. Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk:

- a) Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual.
- b) Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

- c) Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya.
- c. Perbaiki Alat Pendidikan
- Alat pendidikan sangat menunjang terhadap terselenggaranya proses pendidikan, baik yang berupa materi maupun yang non materi.
- Pengadaan alat pendidikan non material maupun material dapat dilakukan:
- 1) Memperbaiki fasilitas yang sudah ada sehingga dapat dipergunakan dengan baik.
  - 2) Membangun serta memperluas fasilitas pendidikan.
  - 3) Melengkapi alat-alat pelajaran seperti; buku-buku perpustakaan dan sebagainya.
  - 4) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan wibawa dengan cara mengadakan tata tertib, pengawasan kedisiplinan, pemberian hukuman dan sebagainya.

### **Simpulan**

Dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidikan Islam di mana objeknya adalah pribadi anak yang sedang berkembang, maka adanya hubungan timbal balik antara penanggung jawab pendidikan yaitu pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat pada umumnya mutlak diperlukan. Dengan kata lain, suatu kerja sama antara penanggung jawab pendidikan tersebut perlu diintensifkan, adanya keharusan hubungan antara sekolah dengan orang tua murid (masyarakat) tersebut, karena :

1. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
2. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat.
3. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
4. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.
5. Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1975. *Pengantar Sosiologi*, (Semarang: CV. Ramadhani)
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. 1987. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- al-Malik, Mujamma'. 1420H. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: tp)
- Departemen Agama RI. 1982. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, IAIN)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Diparta, Made. 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara)
- Imron, Ali. 1996. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Kartono, Kartini. 1991. *Tujuan Pendidikan Harus Sinkron Dengan Tujuan Manusia*, (Bandung: Mandar Maju)
- Ma'arif A. Syafi'i. dkk, 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tiara Wacana)
- Muhaimin dan Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya)
- Polak, J.B.A.F. Major dan Hoeve, Van. 1985. *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkasan*, (Jakarta: Ikhtiyar Baru)
- Purwanto, M. Ngalim MP. 1993. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Uhbiyati, Nur. 1998. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003 (Bandung: Citra Umbara)